



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN LAMPUNG**

Jl. ZA. Pagar Alam No 1a Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145
TELEPON (0721) 781776, FAKSIMILI (0721) 705273
WEBSITE: lampung.brmp.pertanian.go.id – e-mail: brmp.lampung@pertanian.go.id

Nomor : B-617/KP.430/H.12.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Empat lembar
Hal : Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKAN Tahun 2025

18 Mei 2026

Yth.
Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan daftar pegawai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) melalui Coretax DJP (Daftar terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Balai Besar,



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001

Lampiran Surat Kepala Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
Nomor : B-617/KP.430/H.12.9/05/2026
Tanggal : 18 Mei 2026

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2025
LINGKUP BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	76
	a. Wajib LHKPN	6
	b. Tidak Wajib LHKPN	70
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	6
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (Coretax DJP)	70
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (Coretax DJP)	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Bandar Lampung, 18 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Balai Besar,



Endro Gunawan, S.P., M.E., Ph.D.
NIP 197412221999031001



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDRO GUNAWAN
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 1000682

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 179.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 389.000.000

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 289.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARFI IRAWATI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 840766

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.335.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/173 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 1.650 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.850.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 SL Tahun 2007, WARISAN Rp. 2.750.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 28D (MIO/AL115S)A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.103.390

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.389.953.390

III. HUTANG Rp. 82.624.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.307.329.390

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASROPI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 769188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA GX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SPORTY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 747.500.000

III. HUTANG Rp. 174.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 573.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIS AISYAH
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 206226

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	515.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 435.000.000		
2. Tanah Seluas 965 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.032.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	590.032.000
III. HUTANG	Rp.	303.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	287.032.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG LASMONO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 903989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	560.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000		
2. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	4.500.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	592.500.000
III. HUTANG	Rp.	110.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	482.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALDO AFRIANDA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 1000861

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	550.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 636 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	102.000.000
1. MOTOR, YAMAHA FREEGO 125 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2015, HADIAH Rp. 85.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	184.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.173.117
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	850.173.117
III. HUTANG	Rp.	1.791.950
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	848.381.167

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.